

## Rawan Terlambat, Ini Perintah Wali Kota Rahmad Mas'ud Lelang Proyek Jangan Akhir Tahun



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 03/05/2025

**BALIKPAPAN** - Lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa diminta dipercepat. Agar bisa dilaksanakan pada semester pertama tahun 2025. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang terlambat dikerjakan. Dikarenakan lelang kegiatan baru dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025. Bahkan di penghujung tahun.

Atensi tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemkot Balikpapan, di Auditorium Kantor Wali Kota Balikpapan. “Sudah ada beberapa kegiatan yang dilelang. Tinggal kami minta kegiatan yang lain jangan sampai di penghujung akhir tahun atau di semester 2, baru dilakukan pelelangan. Pasti telat. Terutama yang berhubungan dengan fisik,” tegas dia saat diwawancarai Kaltim Post, Rabu (30/4).

Ketua DPD II Partai Golkar Balikpapan ini mewanti-wanti para Kepala Perangkat Daerah di Pemkot Balikpapan, untuk menjalankan kegiatan lelang ini. Untuk menghindari keterlambatan atau kegagalan pekerjaan, serta memastikan hasil pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

Terutama pada kegiatan pembangunan fisik bangunan sekolah dan juga kantor pemerintahan. “Karena APBD itu, dana yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dan ini dana masyarakat yang harus cepat diolah supaya bisa sampai ke masyarakat,” pesan Rahmad.

Dia mengatakan sejak awal tahun, setelah persetujuan APBD 2025 diberikan oleh Gubernur Kaltim, Pemkot Balikpapan sudah bisa melakukan lelang kegiatan dini. Agar APBD Balikpapan bisa menyerap kegiatan masyarakat.

“Karena kita ketahui bahwa dengan penyerapan APBD ini menunjang roda perekonomian. Peredaran uang yang ada di Balikpapan. Itu sangat baik,” jelasnya.

Dikutip dari laman AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal) LPSE Balikpapan, hingga 1 Mei 2025 untuk kegiatan tender sudah ada 68 paket kegiatan dalam tahap perencanaan dengan pagu Rp276,98 miliar. Kemudian ada 6 paket yang masuk dalam tahap persiapan dengan pagu Rp84,3 miliar. Lalu tahapan pemilihan sebanyak 6 paket

dengan pagu Rp84,23 miliar. Selanjutnya tahapan hasil pemilihan sebanyak 6 paket dengan pagu Rp74,4 miliar, dan kontrak ada 1 paket dengan pagu Rp891,8 juta. (ms)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Rawan Terlambat, Ini Peringkat Wali Kota Rahmad Mas'ud Lelang Proyek Jangan Akhir Tahun, 03/05/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Rawan Terlambat, Rahmad Mas'ud: Lelang Proyek Jangan Akhir Tahun, 03/05/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (PP 16/2018), pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP 16/2018 diatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultasi; dan
  - d. jasa lainnya.
3. Diatur dalam Pasal 8 PP 16/2018 bahwa pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:
  - a. PA;
  - b. KPA;
  - c. PPK;
  - d. pejabat pengadaan;
  - e. Pokja pemilihan;
  - f. agen pengadaan;
  - g. penyelenggara swakelola; dan
  - h. penyedia.
4. Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) PP 16/2018 diatur sebagai berikut:
  - (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan pagu indikatif.
  - (3) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).